

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

#### Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

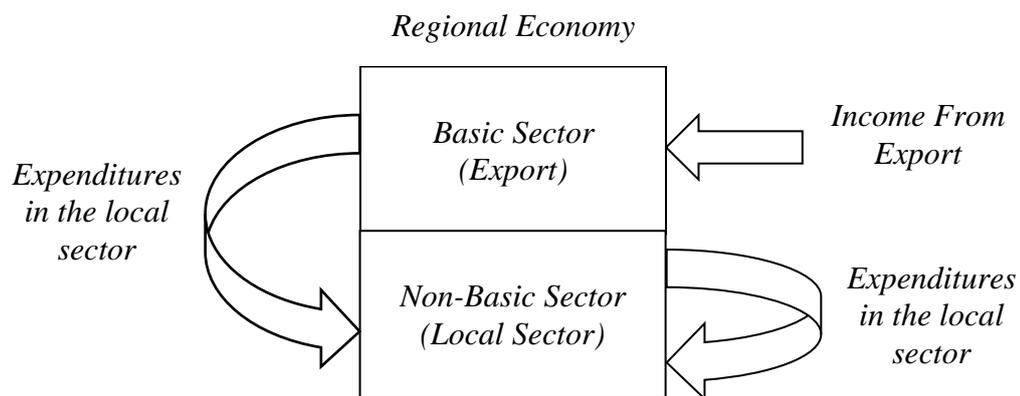
Secara universal model pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut antarlain:

##### Model Basis Ekspor (*Eksport-Base Model*)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah hakikatnya ditentukan oleh besarnya Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang dimiliki oleh daerah tersebut. Apabila suatu daerah tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan akan meningkat cepat. Hal ini dapat terjadi karena

peningkatan ekspor tersebut akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang cukup besar bagi perekonomian daerah bersangkutan (North, 1956)

**Gambar 2.1** *Export base principle* dari North



Sumber: North, *International capital flow and development*, 1956.

Sebuah daerah dikatakan memiliki keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*), dalam memproduksi barang tertentu, X, mempunyai *opportunity cost* yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah perdagangan yang lain. Daerah memiliki berbagai sumber daya, seperti tanah, sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan teknologi keahlian. Biaya produksi antar daerah berbeda, karena sumber daya yang tidak merata. Efisiensi mensyaratkan bahwa daerah dengan *opportunity cost* yang lebih rendah, mengekspor barang ke daerah yang mempunyai *opportunity cost* yang lebih tinggi (Edwards, 2007).

(Blair, 1991) Mengemukakan, secara teori Model Basis Ekspor ini dapat diformulasikan dengan menggunakan *Formal Income Model*. Pada model ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah

dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y = C + MI - MO \dots\dots\dots 1$$

di mana Y adalah PDRB wilayah bersangkutan dengan harga konstan, C adalah konsumsi, MI menunjukkan arus uang masuk ke daerah bersangkutan karena adanya ekspor dan MO adalah arus uang keluar wilayah bersangkutan karena melakukan impor.

$$C = A + bY \dots\dots\dots 2$$

di mana A adalah konstanta yang menunjukkan tingkat konsumsi minimum dan b adalah *Marginal Propensity to Consume* (MPC), yaitu tambahan konsumsi sebagai akibat peningkatan pendapatan. Mengingat pengusaha di negara berkembang umumnya sangat sedikit sekali yang melakukan investasi di luar negeri dan hasilnya dibawa kembali ke daerah, maka ekspor dianggap merupakan satu-satunya sumber yang menyebabkan terjadinya arus pemasukan uang (*inflow*) dari luar negeri, sehingga dapat ditulis:

$$MI = E_o \dots\dots\dots 3$$

di mana MI adalah arus uang masuk (*monetary inflow*) ke wilayah bersangkutan, sedangkan  $E_o$  adalah nilai ekspor yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan yang fluktuasinya ditentukan lebih banyak oleh faktor luar (*exogenous*) seperti harga dan permintaan di pasaran internasional. Selanjutnya, karena penanaman modal asing kebanyakan juga sangat terbatas pada suatu wilayah, maka unsur impor dianggap satu-satunya sumber dari arus uang keluar karena melakukan impor, sehingga

dapat ditulis  $MO = iY$ , di mana  $MO$  adalah arus uang keluar (*monetary outflow*) dari wilayah bersangkutan. Sedangkan  $i$  dan  $Y$  masing-masingnya adalah *Marginal Propensity to Import* (MPI) dan nilai PDRB wilayah bersangkutan dengan harga konstan. Kemudian, dengan menggabungkan ke semua persamaan sebagai berikut;

$$Y = A + bY + E_o - iY \text{ atau } Y = [1/(1-b + i)] (A + E_o).....4$$

Dapat disimpulkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh perubahan nilai ekspor wilayah bersangkutan. Sedangkan pengaruh dari perubahan nilai ekspor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah akan ditentukan besarnya oleh koefisien multiplier yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk formulasi Model Basis Ekspor tersebut adalah dengan menggunakan Model Basis Ekonomi yang hasil analisisnya akan sama. Dalam hal ini, perekonomian suatu daerah yang diwakili oleh nilai PDRB-nya ( $Y$ ) dapat dibagi atas 2 kelompok sektor utama dan sangat potensial yaitu Sektor Basis (B) dan Sektor Non Basis (S). Sektor Basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian wilayah bersangkutan karena bersangkutan karena mempunyai Keuntungan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan Sektor Non Basis adalah sektor-sektor lainnya yang berfungsi sebagai industri penunjang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang seperti *Service Industries*. Dengan demikian, perekonomian suatu daerah secara sederhana dapat direpresentasikan

melalui persamaan:

$$Y = B + S \dots\dots\dots(\text{persamaan 1})$$

Kegiatan sektor penunjang (Non Basis) tersebut tentunya sangat tergantung pula pada perkembangan Sektor Basis itu sendiri, sehingga hubungannya dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

$$S = a_0 + a_1 Y \dots\dots\dots(\text{persamaan 2})$$

di mana  $a_0$  dan  $a_1$  masing-masingnya adalah konstanta. Bila kedua persamaan diatas disubstitusikan, dapat diperoleh hubungan linier antara sektor penunjang dan sektor basis sebagai berikut:

$$Y = [a_0/(1-a_1)] + [1/(1-a_1)] B \text{ dan } Y = [a_0/(1-a_1)] + [B/(1-a_1)] \text{ ---} \Delta Y = [a_0/(1-a_1)] + [1/(1-a_1)] \Delta B \dots\dots\dots(\text{Persamaan 3})$$

di mana  $\Delta Y$  adalah peningkatan PDRB dan  $\Delta B$  adalah peningkatan sektor basis. Memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan sektor basis yang terdapat di wilayah bersangkutan, besar pengaruhnya ditentukan oleh koefisien multiplier  $1/(1+a)$ . pengertian ekspor dalam hal ini dapat berbentuk perdagangan luar negeri atau perdagangan antarwilayah dalam suatu negara.

#### Model Interregional *Income*

Richardson (1978), mentaksir ekspor sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah bersangkutan (*endogeneous variable*) yang fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antarwilayah. Kegiatan perdagangan antarwilayah tersebut dibagi atas

barang konsumsi dan barang modal. Agar analisis menjadi lebih realistis, maka model antarregion ini dimasukkan pula unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip Teori Ekonomi Keynes (Tarigan, 2005).

Mengikuti Teori Ekonomi Keynes, model pertumbuhan ekonomi *interregional* sederhana dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M_i) \dots \dots \dots 5$$

Di mana Y, C, I, G, X dan M masing-masingnya adalah pendapatan regional (PDRB), konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, sedangkan subskrip ini menunjukkan region/daerah. Selanjutnya persamaan konsumsi masing-masing daerah digambarkan sederhana dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut:

$$C_i = a_i + b_i Y_i \dots \dots \dots 6$$

Di mana  $a_i$  adalah tingkat konsumsi minimum (pada saat pendapatan nol) dan  $b_i$  adalah *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Persamaan ekspor dan impor untuk masing-masing region ditampilkan dengan persamaan berikut:

$$X_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} Y_j \text{ dan } M_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} Y_i \dots \dots \dots 7$$

di mana  $m$  adalah *Marginal Propensity to Import* (MPM). Sedangkan persamaan penerimaan pemerintah daerah (pajak) dapat digambarkan

sebagai berikut:  $Y_i = Y_i (1 - t_i)$ ,  $t_i$  melambangkan persentase pengenaan pajak daerah pada region  $i$ . Sedangkan pengeluaran investasi dan pemerintah daerah dianggap sebagai variabel *autonomous* yang ditentukan oleh faktor politik di luar model, sehingga dapat ditulis sebagai berikut:  $I_i = I_i$  dan  $G_i = G_i$ . Sehingga pengeluaran *autonomous* untuk region ( $A_i$ ) dapat ditulis sebagai berikut:  $A_i = a_i + I_i + G_i$ . melalui substitusi diperoleh persamaan akhir sebagai berikut:

$$Y_i = [A_i + \sum_{j=1}^n m_{ij} Y_j (1 - t_j)] / [1 - (c_i \sum_{j=1}^n m_{ji}) (1 - t_i)] \dots \dots \dots 8$$

Dengan demikian, terlihat bahwa pendapatan regional suatu daerah ditentukan oleh unsur pengeluaran *autonomous* ditambah dengan ekspor region bersangkutan dan dampaknya ditentukan oleh angka *multiplier*. Persamaan ini mempunyai implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan melihat pada peningkatan pendapatan regional untuk periode tertentu (Tarigan, 2005).

### *Shift-Share Analysis*

Analisis *Shift-Share* mengidentifikasi peranan ekonomi nasional dan kekhususan daerah bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Mengikuti (Blair, 1991), menunjukkan bahwa peningkatan produksi atau nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan atas tiga bagian, antara lain:

- 1) *Regional Share* adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada

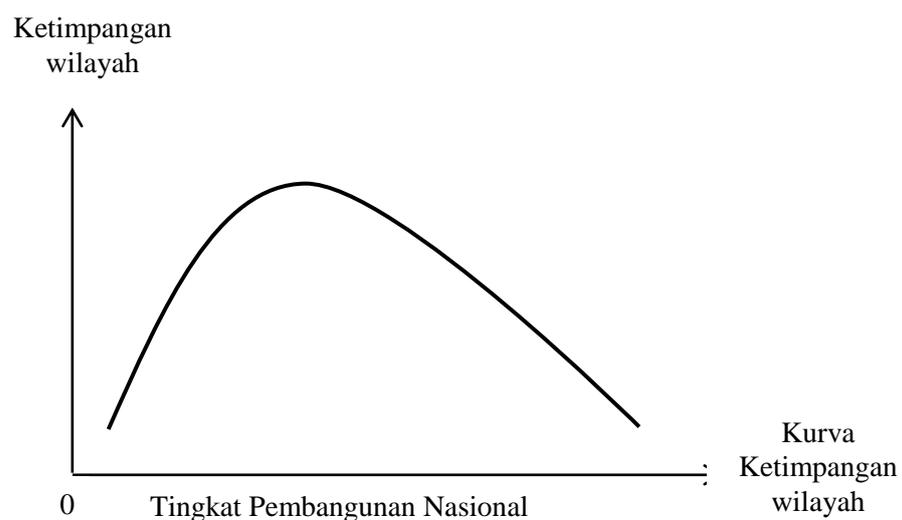
seluruh daerah.

- 2) *Proportionality Shift (Mixed Shift)* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor insutri.
- 3) *Differential Shift (Competitive Shift)* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah bersangkutan.

#### Model Neo-klasik

Menurut (Richardson, 1978), kesimpulan dari model ini dikenal sebagai Hipotesis Neo-klasik yang digambarkan oleh Grafik 2.

**Grafik 2.2 Hipotesis Neo-Klasik**



Sesuai dengan grafik di atas, hipotesis yang dapat ditarik sebagai berikut. *Pertama*, kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan jumlah dan tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. *Kedua*, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antardaerah akan berkurang dengan sendirinya.

### **Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah**

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Gie (1983) masalah ketimpangan wilayah dapat ditinjau dari tiga segi yaitu *regional income disparity*, *urban rural income disparity* *size of distribution on income*. Ketimpangan jenis pertama lebih bersifat struktural. Di tengah permasalahan pembangunan yang kian pelik dan beragam di tiap daerah, maka daerah mau tidak mau harus diberikan porsi yang semakin besar untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapinya dan merumuskan

strategi dan langkah-langkah pemecahannya. Ketimpangan kedua, yakni kesenjangan antar sektor, lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan (*urban bias*) atau ke sektor modern sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif tertinggal. Ketimpangan jenis ketiga, yakni ketimpangan pendapatan. Jika pendapatan rata-rata masyarakat secara keseluruhan telah meningkat, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan yang meningkat. Apalagi kalau kelompok sosial yang berpendapatan tinggi meraih dan menikmati kekayaan lewat cara-cara yang justru dapat merugikan masyarakat yang berpendapatan lebih rendah (Kuncoro, 2006). Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2006).

Glasson (1997), menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasikan menjadi daerah homogen (*homogeneous region*), daerah administrasi (*administrative region*) dan daerah nodal (*nodal region*). Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh (North, 1956) dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan

antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesis ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik.

Menurut Hipotesis Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan Hipotesis ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

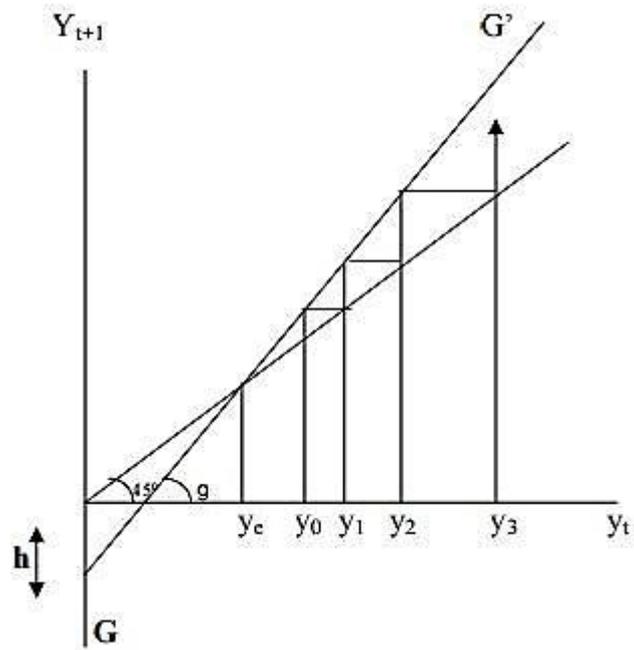
Kebenaran Hipotesis Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional

tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan masyarakat pada wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Parameter lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Pembangunan wilayah harus bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat.

(Nikolas Kaldor dalam Sjafrizal, 2012) mengkritik Model Neo-Klasik. Kaldor tidak percaya pemerataan pembangunan antardearah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah yang intensif. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan. Analisis ini dapat dipresentasikan melalui Grafik 3.

**Gambar 2.3 Pertumbuhan Penyebab Berkumulatif**



Sumber: (Richardson, *Regional Growth Theory*, 1973, p. 149)

Pada Grafik 3 ditunjukkan mengenai kurva  $G$  yang mewakili pertumbuhan ekonomi daerah. Titik keseimbangan tercapai pada titik  $E$  dimana kurva  $G$  berpotongan dengan garis bantu  $45^\circ$ . Sebelum titik keseimbangan kurva  $G$  berada dibawah garis bantu  $45^\circ$  yang berarti sudutnya,  $g < 1$  dan  $h < 1$  pertumbuhan ekonomi daerah tidak berkumulatif sehingga ketimpangan ekonomi daerah cenderung mengecil (*convergence*). Akan tetapi di atas titik  $E$ ,  $g > 1$  dan  $h > 1$ , maka pertumbuhan ekonomi daerah berkumulatif sehingga cenderung melebar (*divergence*) (Richardson, 1973).

### **Penelitian Terdahulu**

Uray Dian Novita (2013) tentang Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Singkawang dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), menggunakan metode Analisis *Location Quotient*, analisis *Shift Share* dan analisis menurut *Klassen Typology*. Hasil analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan tumbuh dengan cepat adalah sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa merupakan sektor basis. Hasil *Shift Share* menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang kompetitif. Hasil overlay dari analisis gabungan tiga analisis yaitu LQ, *Shift Share* dan *Klassen Typology* dari semua sektor ternyata didapat bahwa sektor bangunan merupakan sektor unggulan yang memenuhi ketiga kriteria analisis diatas yaitu semua menunjukkan angka yang positif.

Muhammad Ghufron (2008) tentang analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis *Location Quotien*, *Multiplier* pendapatan, Analisis *Shift Share* dan SWOT. Terdapat tiga sektor unggulan Kabupaten Lamongan yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan enam sektor lainnya termasuk ke dalam sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan dan daerah. Pada efek pengganda pendapatan sektor basis yang dihasilkan menunjukkan bahwa koefisien pengganda pendapatan selama tahun 2002-2006 lebih besar dari pada efek pengganda pendapatan di sektor non basis. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap aktifitas ekonomi di sektor basis lebih besar. Hasil analisis Shift Share menunjukkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik begitu juga pada sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Inti dari strategi kebijakan pembangunan adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan memperdayakan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sektor unggulan daerah dan mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang sektor unggulan daerah.

Menggunakan Indeks Williamson, analisis *Shift-share*, dan Analisis Tipologi Klassen, (Murdiono & Setiartiti, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Disparitas Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Gorontalo, Indonesia”. Mengungkapkan bahwa, berdasarkan analisis Tipologi Klassen wilayah-wilayah di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 3 (tiga) kuadran. Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato menempati kuadran I, atau merupakan wilayah dengan perekonomian terbaik dengan berstatus daerah maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara merupakan wilayah yang cepat tumbuh, sedangkan wilayah dengan perekonomian ter-buruk atau berstatus wilayah yang relatif tertinggal adalah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan nilai Indeks Williamson, kondisi ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah. Meskipun ketimpangan pembangunan di

Provinsi Gorontalo tergolong rendah namun selalu mengalami peningkatan (*divergence*) atau pelebaran. Penurunan (*convergence*) ketimpangan hanya terjadi pada tahun 2010 dan naik kembali pada tahun-tahun setelahnya. Masing-masing wilayah di Provinsi Gorontalo memiliki beberapa sektor unggulan dan dominan yang ditinjau dari segi kontribusi dan pertumbuhannya yang dapat dikembangkan guna meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah, khususnya di wilayah yang relatif tertinggal. Kabupaten Boalemo memiliki 2 sektor potensial yakni sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Gorontalo memiliki 3 sektor potensial yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Kabupaten Pohuwato memiliki 2 sektor potensial yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Bone Bolango memiliki 2 sektor potensial yakni sektor pertanian dan sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 2 sektor potensial yakni sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kota Gorontalo memiliki 3 sektor potensial yakni sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan.

## Kerangka Pemikiran Penelitian

Merujuk kepada Teori diatas, maka diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**

